



EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

**TRIWULAN
IV 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
NIP. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Maksud dan Tujuan 3

1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja 4

1.4. Program dan Kegiatan 9

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021..... 10

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
dan Renstra 10

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/
Kegiatan Dalam Renja 13

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 15

BAB IV PENUTUP..... 16

LAMPIRAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2022 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV antara lain :

- a. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	80
	Survey Kepuasan Payananan Internal	85%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	7
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	2 LAYANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semeteran yang disusun	4
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	10 Jenis
Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terlaksana	2
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	6.25 %
	Persentase Penyediaan Air Baku	0%
	Rasio Layanan Irigasi (%)	38.81 %
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	2 dokumen
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PSDA	1 dokumen
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	0.9 Hektar
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km)	87 Km
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan	1 Lembaga
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha)	2849 Hektar
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha)	500 Hektar
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha)	663 Hektar
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luasan daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha)	686 Hektar
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha)	1000 Hektar
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional(lembaga)	1 lembaga

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	15,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	750
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang ditingkatkan (unit)	750
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	30,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh sistem persampahan regional	144,00
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah sarana dan prasarana cubluk untuk pemicuan PHBS (KK)	144
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	3,80
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan (dokumen)	1,15
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen penataan bangunan dan lingkungan (dokumen)	2
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	92%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km)	
	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km)	
	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km)	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen)	2,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan yang terbangun (km)	850.99 km; 3802.86 m

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km)	7,72
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	1,66
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km)	2,58
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	850.99 km; 3802.86 m
Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti (M)	143 m
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara (km)	3793,11
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	65%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi	Persentase sertifikasi tenaga ahli	50.13 %
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih (ORANG)	60 orang
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100%
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI	3 layanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	100%
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang Procinsi yang ditetapkan	1 dokumen
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	1 dokumen
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi	10 penyelenggaraan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	4 pelanggaran
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang	6 rekomendasi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	50,00

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan	100,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi yang diidentifikasi	1000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	100,00
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	4,00
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	4
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	100%
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	100%
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15000 Ha
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD	100%
Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100%

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
1	2	3
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100%

1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan. Pada Anggaran Belanja Tambahan tahun 2022 bertambah 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

B A B II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TW. IV TAHUN 2022

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTR A	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
1	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
1	2
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
1	2
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
1	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dalam rencana strategis dan 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2022.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Per Triwulan

		Realisasi	Target
PAGU TW I	177.603.639.168	3,74%	25,00%
REALISASI TW I	6.647.060.984		
PAGU TW II (DAK)	215.302.121.370	8,73%	50,00%
REALISASI TW II	18.798.027.493		
PAGU TW III (DAK+G20)	239.793.886.779	36,51%	85,00%
REALISASI TW III	87.545.997.716		
PAGU TW IV (ABT)	265.551.407.437	86,94%	100,00%
REALISASI TW IV	230.862.354.590		

Jumlah pagu pada triwulan empat mengalami kenaikan karena adanya penambahan dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan sebesar kurang lebih 25 Miliar Rupiah. Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan IV Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 230.862.354.590 (86,94%)** dari pagu **Rp. 265.551.407.437**. Dari total 230,9 miliar yang terealisasi hingga triwulan empat diketahui bahwa belanja operasi dan belanja modal sama-sama menyisakan pagu yang cukup banyak, total 34 Miliar. Tabel evaluasi terhadap hasil renja triwulan IV dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

Tabel 2.3
Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
BELANJA DAERAH	265.551.407.437	230.862.354.590	34.689.052.847	86,94%
BELANJA OPERASI	105.495.024.988	86.337.415.043	19.157.609.945	81,84%
Belanja Barang dan Jasa	71.267.762.627	59.304.821.965	11.962.940.662	83,21%
Belanja Pegawai	26.543.857.511	23.492.668.228	3.051.189.283	88,51%
Belanja Hibah	7.683.404.850	3.539.924.850	4.143.480.000	46,07%
BELANJA MODAL	160.056.382.449	144.524.939.547	15.531.442.902	90,30%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.562.330.651	361.290.199	1.201.040.452	23,13%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.951.600	391.500.000	8.451.600	97,89%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.594.710.198	143.348.069.348	14.246.640.850	90,96%
Belanja Modal Tanah	499.390.000	424.080.000	75.310.000	84,92%

B A B III

KENDALA

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dari TW I hingga TW III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(TW I)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat terbit, sehingga kepastian pelaksanaan anggaran terlambat.
2. Akibat dari telatnya DPA adalah proses persiapan dan perencanaan pengadaan terhambat karena SIPD Perencanaan yang sudah terkoneksi dengan SIRUP. RUP baru dapat di proses setelah DPA *fixed* dan selesai. Hal ini mengakibatkan terlambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa.
3. Perubahan aturan penunjukan PPTK dan PPK mengharuskan perangkat daerah mempelajari Kembali aturan dan juga mengkaji terlebih dahulu dampak dan akibatnya sehingga SK PPK dan PPTK pun terlambat.
4. Ada perubahan penggunaan sistem penatausahaan keuangan yang tidak disertai pemberian pengetahuan kepada bagian keuangan. Hal tersebut menyebabkan terlambatnya proses pencairan keuangan sehingga terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemberian gaji dan tunjangan.
5. Gaji dan Tunjangan terlambat diberikan sehingga kinerja pegawai dan imunitasnya menurun. Pada masa penyebaran Covid-19 Omicron banyak pegawai yang terinfeksi sehingga pelaksanaan awal kegiatan di triwulan ini pun terlambat.
6. Kebijakan BAKUDA Provinsi terkait pemrosesan DAK pada dokumen anggaran menyebabkan terlambatnya proses lelang paket DAK.

(TW II)

1. Adanya perubahan susunan pejabat eselon III dan IV menyebabkan perlunya penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan.
2. Proses persiapan dan pelaksanaan lelang yang cukup rumit menyebabkan terhambatnya proses untuk memulai pekerjaan sehingga realisasi kinerja dan keuangan pun terhambat.

(TW III)

1. Ada beberapa paket pekerjaan yang memerlukan waktu lebih untuk proses lelang karena adanya proses sanggah banding dan juga terdapat beberapa paket yang sempat gagal lelang.
2. Cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu factor penghambat kelancaran realisasi fisik kegiatan bidang teknis.

(TW IV)

1. Telatnya dokumen Anggaran Belanja Tambahan menyebabkan berkurangnya waktu untuk pelaksanaan beberapa kegiatan. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 baru terbit pada tanggal 16 November 2022. Sedangkan beberapa kegiatan yang dianggarkan di ABT diasumsikan mulai dilaksanakan mulai triwulan 4 atau awal bulan Oktober.

B A B IV

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sampai dengan triwulan IV sebesar adalah sebesar **Rp. 230.862.354.590 (86,94%)** dari pagu **Rp. 265.551.407.437**. Apa yang dialami di tahun 2022 sepatutnya menjadi bahan evaluasi dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada tahun anggaran ini dan juga sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

DINAS PEKERJAA

NO	KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2					3
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	1	03	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1	03	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1	03	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan
	1	03	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1	03	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran
	1	03	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1	03	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1	03	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1	3	1	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
	1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	1	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1	03	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1	3	2	1.01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
	1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
	1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai
	1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
	1	3	2	1.02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	1	3	2	1.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
	1	3	2	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
	1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	1	3	2	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
	1	3	2	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1	3	3	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1	3	5	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	1	03	09	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	1	03	09	1.01	03	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	1	03	10	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

	1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan
	1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
	1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
	1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan
	1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1	03	11	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi
	1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
	1	03	11	1.02		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
	1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	1.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
	1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
	1	03	12	1.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

	1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1	4	2	1.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	1	04	05	1.01		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	2	10	5	1.01		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	1	03	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)
	1	03	01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1	03	01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1	03	01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1	03	01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
	1	03	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1	03	01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	1	03	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

	1	03	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
	1	03	01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan
	1	03	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**TABEL PENGENDALIAN DAN EVALUASI
N UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET/ PAGU (ABT)		TW IV (S.D	
			K	%
4	K	Rp	K	%
Nilai Sakip	80	35,332,797,119	-	0.00%
Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85%		-	0.00%
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	14	823,554,430	14	100.00%
Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	7	569,375,672	7	100.00%
Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	7	254,178,758	7	100.00%
Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	2	26,566,334,941	2	100.00%
Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	26,543,857,511	24	100.00%
Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	4	22,477,430	4	100.00%
Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100%	69,944,000	52,74%	52.74%
Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	69,944,000	52.74%	52.74%
Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%	1,026,728,794	76.63%	76.63%
Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	14,985,098	90.82%	90.82%
Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	23,345,972	64.25%	64.25%
Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	57,999,504	63.86%	63.86%
Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	25,000,000	59.50%	59.50%
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan	100%	126,493,220	56.04%	56.04%
Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	778,905,000	81.57%	81.57%
Jumlah barang daerah yang memadai	10	1,615,366,703	5	50.00%
Tingkat ketersediaan Mebel	100%	362,903,499	42.87%	42.87%
Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	499,590,103	38.06%	38.06%
jumlah gedung kantor yang terlaksana	2	752,873,101	2	100.00%

Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3,043,332,738	86.37%	86.37%
Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100%	159,732,837	58.26%	58.26%
tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	395,399,901	59.60%	59.60%
Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100%	2,488,200,000	92.42%	92.42%
Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,187,535,513	64.48%	64.48%
Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	437,930,000	48.39%	48.39%
Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100%	556,837,554	19.47%	19.47%
Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1,165,768,700	92.96%	92.96%
Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	26,999,259	23.67%	23.67%
Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	6.25 %	32,186,622,655	3.40%	
Persentase Penyediaan Air Baku	0%		0	
Rasio Layanan Irigasi (%)	38.81 %		63.80%	
Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000	13,555,899,181	1,714	57.14%
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	2 dokumen	35,837,830	0	0.00%
Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PSDA	1 dokumen	981,016,980	0	0.00%
Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	0,9	6,540,388,752	0.9	100.00%
Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km)	87	5,759,999,277	67	100.00%
Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan	1 Lembaga	238,656,342	0	0.00%
Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha)	640	18,630,723,474	640	100.00%

Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha)	290	9,426,143,492	290	100.00%
luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha)	350	8,254,587,061	350	100.00%
Luasan daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha)	686	399,996,788	590	86.01%
Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha)	1000	249,999,830	1000	100.00%
Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional(lembaga)	1	299,996,303	1	100.00%
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	0.00	7,319,817,161	-	0.00%
Jumlah SR Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	0	7,319,817,161	-	0.00%
Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang ditingkatkan (unit)	300	7,319,817,161	300.00	100.00%
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	30.00	638,400,000	30.00	100.00%
Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh sistem persampahan regional	144.00	638,400,000	144.00	100.00%
Jumlah sarana dan prasarana cubluk untuk pemucuan PHBS (KK)	36	638,400,000	36	100.00%
Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	3.80	1,183,518,000	1	26.32%
Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	3.80	1,183,518,000	1	26.32%
Luas Kawasan yang ditata bangunan gedung dan lingkungannya	0.59	1,183,518,000	0.59	100.00%
Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	100	7,824,555,955	33%	33%
Jumlah Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2	7,824,555,955	-	-
Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2	7,824,555,955	-	-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)		172,118,061,334		
Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km)	9.81	172,118,061,334	9.81	100.00%

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km)	863.42		863.42	100.00%
Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (m)	3903.11		3903.11	100.00%
Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen)	2.00	1,118,931,651	1.00	50.00%
Panjang jalan/jembatan yang disurvey	850.99 km; 3802.86 m	484,647,790	850.99 km; 3802.86 m	100.00%
Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km)	9.81	46,873,083,108	9.81	100.00%
Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	1.66	20,711,087,212	1.66	100.00%
Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km)	19.72	68,137,381,493	19.72	100.00%
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	842.04	26,516,497,254	842.04	100.00%
Panjang jembatan yang diganti (M)	110.00	4,176,474,854	110.00	100.00%
Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara (km)	3793.11	4,099,957,972	3793.11	100.00%
Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	65%	1,332,653,641	67.68%	104.12%
Persentase sertifikasi tenaga ahli	50.13%	1,088,293,691	53.83%	107.38%
Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih (ORANG)	60	1,088,293,691	85.00	141.67%
Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100%	244,359,950	100%	100.00%
Jumlah Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI	3	244,359,950	4.00	133.33%
Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	100	2,317,322,423	100	100.00%
Jumlah dokumen rencana tata ruang Provinsi yang ditetapkan	1	1,572,862,659	1	100.00%
Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	1	1,572,862,659	1	100.00%
Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi	10	744,459,764	15	150.00%
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	4	456,881,567	15	375.00%

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang	6	287,578,197	6	100.00%
Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	50.00	441,089,873	50	100.00%
Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan	100.00	441,089,873	100	100.00%
Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1000.00	441,089,873	1000.00	100.00%
Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	100.00	3,369,709,414	100	100.00%
Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.00	3,369,709,414	2	100.00%
Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	2	3,369,709,414	2.00	100.00%
Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	33%	736,876,862	33%	100.00%
Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	100%	736,876,862	33%	33.33%
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	9	736,876,862	3.00	33.33%
SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD	100%	749,983,000	81.74%	81.74%
Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%	116,111,290	39.97%	39.97%
Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100%	1,293,304	37.35%	37.35%
Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (%)	100%	21,249,986	90.27%	90.27%
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%)	100%	20,070,000	21.05%	21.05%
Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100%	73,498,000	30.63%	30.63%
Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	450,762,530	94.79%	94.79%
Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100%	2,620,000	93.13%	93.13%
tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100%	94,342,530	90.66%	90.66%
Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100%	353,800,000	95.90%	95.90%

Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	183,109,180	76.11%	76.11%
Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100%	113,110,000	67.64%	67.64%
Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100%	29,999,180	78.18%	78.18%
Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100%	40,000,000	98.53%	98.53%

TOTAL

265,551,407,437

		KET
. DESEMBER)		
Rp	%	
29,841,772,668	84.46%	
724,877,175	88.02%	
513,496,220	90.19%	
211,380,955	83.16%	
23,501,574,091	88.46%	
23,492,668,228	88.51%	
8,905,863	39.62%	
36,888,800	52.74%	
36,888,800	52.74%	
786,791,527	76.63%	
13,610,042	90.82%	
15,000,000	64.25%	
37,039,600	63.86%	
14,875,000	59.50%	
70,891,675	56.04%	
635,375,210	81.57%	
752,790,199	46.60%	
155,591,200	42.87%	
190,144,999	38.06%	
407,054,000	54.07%	

2,628,425,214	86.37%	
93,062,356	58.26%	
235,662,858	59.60%	
2,299,700,000	92.42%	
1,410,425,662	64.48%	
211,895,671	48.39%	
108,411,000	19.47%	
1,083,726,991	92.96%	
6,392,000	23.67%	
26,558,252,844	82.51%	
8,896,167,832	65.63%	
-	0.00%	
7,834,977	0.80%	
4,408,629,055	67.41%	
4,479,703,800	77.77%	
-	0.00%	
17,662,085,012	94.80%	

9,326,574,641	98.94%	
7,570,590,671	91.71%	
336,168,000	84.04%	
243,067,000	97.23%	
185,684,700	61.90%	
6,960,066,970	95.09%	
6,960,066,970	95.09%	
6,960,066,970	95.09%	
628,413,708	98.44%	
628,413,708	98.44%	
628,413,708	98.44%	
1,034,030,668	87.37%	
1,034,030,668	87.37%	
1,034,030,668	87.37%	
3,539,924,850	45.24%	
3,539,924,850	45.24%	
3,539,924,850	45.24%	
155,532,871,935	90.36%	
155,532,871,935	90.36%	

497,776,192	44.49%	
328,486,628	67.78%	
45,961,603,804	98.06%	
20,632,840,245	99.62%	
54,732,124,131	80.33%	
26,060,085,385	98.28%	
4,105,565,848	98.30%	
3,214,389,702	78.40%	
899,709,497	67.51%	
726,818,331	66.79%	
726,818,331	66.79%	
172,891,166	70.75%	
172,891,166	70.75%	
1,425,778,777	61.53%	
879,852,694	55.94%	
879,852,694	55.94%	
545,926,083	73.33%	
313,892,504	68.70%	

232,033,579	80.69%	
376,048,250	85.25%	
376,048,250	85.25%	
376,048,250	85.25%	
2,928,337,942	86.90%	
2,928,337,942	86.90%	
2,928,337,942	86.90%	
524,103,866	71.13%	
524,103,866	71.13%	
524,103,866	71.13%	
613,042,615	81.74%	
46,405,773	39.97%	
483,000	37.35%	
19,182,250	90.27%	
4,225,000	21.05%	
22,515,523	30.63%	
427,271,193	94.79%	
2,440,000	93.13%	
85,531,193	90.66%	
339,300,000	95.90%	

139,365,649	76.11%	
76,502,849	67.64%	
23,452,800	78.18%	
39,410,000	98.53%	

230,862,354,590

BIDANG	NO
SEKRE	1
UPTD	2
SDA	3
BM	4
JAKON	5
TARU	6
	7
	8
	9
CK/PERKIM	10
	11
	12

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN BIDANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

TW I RP	AVE	TW II RP	AVE	TW III RP	AVE	TW IV RP	AVE
18.46%	18.46%	43.62%	43.62%	70.47%	70.47%	84.46%	84.46%
10.46%	10.46%	32.34%	32.34%	53.98%	53.98%	81.74%	81.74%
0.66%	0.66%	6.39%	6.39%	21.64%	21.64%	82.51%	82.51%
4.97%	4.97%	1.46%	1.46%	35.14%	35.14%	90.36%	90.36%
5.32%	5.32%	8.09%	8.09%	22.74%	22.74%	67.51%	67.51%
9.19%	5.35%	13.12%	34.95%	29.65%	43.49%	61.53%	66.33%
1.50%		56.77%		57.34%		71.13%	
0.00%	0.02%	0.00%	0.15%	0.23%	10.01%	95.09%	90.61%
0.00%		0.00%		1.22%		98.44%	
0.00%		0.00%		0.14%		87.37%	
0.00%		0.31%		28.26%		85.25%	
0.10%		0.46%		20.19%		86.90%	

		Realisasi	Target
PAGU TW I	177,603,639,168		
REALISASI TW I	6,647,060,984	3.74%	25.00%
PAGU TW II (DAK)	215,302,121,370		
REALISASI TW II	18,798,027,493	8.73%	50.00%
PAGU TW III (DAK+G20)	239,793,886,779		
REALISASI TW III	87,545,997,716	36.51%	85.00%
PAGU TW IV (ABT)	265,551,407,437		
REALISASI TW IV	230,862,354,590	86.94%	100.00%

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
BELANJA DAERAH	265,551,407,437	230,862,354,590	34,689,052,847	86.94%
BELANJA OPERASI	105,495,024,988	86,337,415,043	19,157,609,945	81.84%
Belanja Barang dan Jasa	71,267,762,627	59,304,821,965	11,962,940,662	83.21%
Belanja Pegawai	26,543,857,511	23,492,668,228	3,051,189,283	88.51%
Belanja Hibah	7,683,404,850	3,539,924,850	4,143,480,000	46.07%
BELANJA MODAL	160,056,382,449	144,524,939,547	15,531,442,902	90.30%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,562,330,651	361,290,199	1,201,040,452	23.13%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399,951,600	391,500,000	8,451,600	97.89%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157,594,710,198	143,348,069,348	14,246,640,850	90.96%
Belanja Modal Tanah	499,390,000	424,080,000	75,310,000	84.92%